

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
“LABORATORIUM KEMISKINAN” DI KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Ulil Albab

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan

e-mail: ulilalbab@gmail.com

Submitted 04/04/2023 Revised 03/10/2023 Accepted 30/10/2023

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi salah satu program utama Sustainable Development Goal's (SDG's) yang telah disepakati negara-negara di dunia. Konsep pengentasan kemiskinan berdasarkan maqashid syariah mengedepankan kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah dalam konsep pengentasan kemiskinan. Kemiskinan kabupaten Pekalongan sebesar 10,57% di tahun 2021. Angka presentase kemiskinan tersebut dibawah presentase provinsi jawa tengah sebesar 11,79 % dan diatas nasional sebesar 10,14%. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dalam analisisnya. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) di Pekalongan dengan Kolaborasi Pentahelix melalui Participatory Poverty Assessment (PPA) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengambil keputusan program kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan agar mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, tepat program dan tepat sasaran. Kebijakan Laboratorium Kemiskinan melalui program kegiatan yang terlaksana memenuhi nilai-nilai maqashid syariah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah, Nilai-Nilai Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Poverty is one of the main Sustainable Development Goals (SDG's) programs that have been agreed upon by countries in the world. The concept of poverty alleviation based on maqashid sharia prioritizes the position of humans in the world as caliphs in the concept of poverty alleviation. Pekalongan district poverty is 10.57% in 2021. This poverty percentage figure is below the Central Java province percentage of 11.79% and above the national level of 10.14%. This research uses a qualitative type using descriptive methods in its analysis. The results of the research found that the implementation of poverty reduction policies (Poverty Laboratory) in Pekalongan with the Pentahelix Collaboration through Participatory Poverty Assessment (PPA) was carried out by the Pekalongan Regency Government in making decisions on activity programs that were planned to be implemented in order to overcome poverty problems in an integrated, appropriate program and on target. Poverty Laboratory Policy through implemented activity programs fulfills maqashid sharia values.

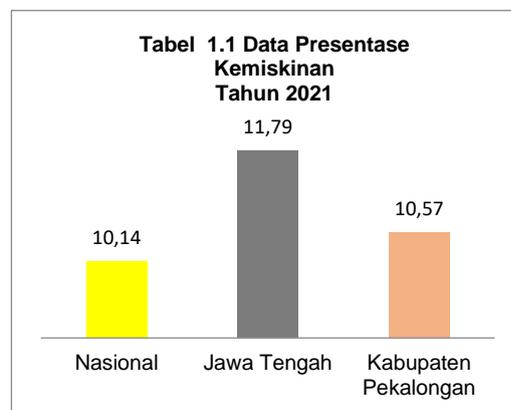
Keywords: Poverty, Government Policy, Maqashid Syariah Values.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu program utama Sustainable Development Goal's (SDG's) yang telah disepakati negara-negara di dunia. Kemiskinan menjadi suatu permasalahan bagi negara-negara berkembang salah satunya Indonesia.¹ Dalam Islam Allah swt telah menetapkan dalam syariat Islam untuk mengatur dan membatasi kepentingan individual manusia. Menurut al-syatibi : bahwa syariat diturunkan kepada umat manusia untuk merealisasikan kemaslahatan baik didunia dan diakhirat, karena prinsip kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan syariah (Maqashid Syariah).²

Maqashid syariah mengedepankan kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah yang mana menjadi konsep dalam penanggulangan kemiskinan. Titikberatkankan pada pembangunan sebuah negara dalam mengelola dan menggunakan kekayaan alam secara bertanggung jawab, bermanfaat secara sosial tidak menyalahgunakan merupakan konsep pengentasan kemiskinan. Kekayaan tersebut dapat dibagikan kepada orang yang membutuhkan melalui pembayaran zakat, infaq, sedekah, & Waqaf.³

Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum terlepas dari permasalahan kemiskinan Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS , kemiskinan Kabupaten Pekalongan sebesar 10,57% di tahun 2021. Angka presentase kemiskinan tersebut dibawah presentase Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,79 % dan diatas nasional sebesar 10,14%. Sebagaimana data berikut:



¹ Dwi Ispriyanti, Alan Prahutama, and Dan Mustafid, 'Jurnal : Analisis Klasifikasi Kemiskinan Di Kota Semarang Menggunakan ALGORITMA QUEST', 7.1 (2019). hlm.47

² Zainil Ghulam, 'Implementasi Maqashid Syariah', 7.1 (2016). hlm.2

³ A Jajang and others, *Ekonomi Pembangunan Islam* "Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, ed. by Muhammad Irfan, Sultan Emi (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).hlm.210

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mengalami fluktuatif, pada tahun tertentu mengalami penurunan, dan pada tahun yang lain mengalami kenaikan setiap tahunnya, sebagaimana data berikut :

Tabel 1.2

Perkembangan Kemiskinan Di Kabupaten Pekalongan

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Kemiskinan					
Presentase	12.61	10.06	9.71	10.19	10.57
Kemiskinan					
Garis	354.435	361.297	382.832	403.662	416.779
Kemiskinan					
Jumlah	111.58	89.54	87.01	91.86	95.26
Penduduk					
Miskin					

BPS Kabupaten Pekalongan 2017-2021

Berdasarkan data diatas terlihat dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan sebesar 10,57% di tahun 2021. Memang dalam tiga tahun awal dari 2017 hingga 2019 mengalami tren penurunan sebesar 2,9%, namun di tahun selanjutnya hingga tahun 2021 mengalami trend peningkatan sebesar 0,86%. Di Kabupaten Pekalongan terdapat 285 desa/kelurahan yang mana terletak di 3 wilayah diantaranya : pegunungan, perkotaan, dan pesisir. Pada 3 wilayah tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan pada basis data terpadu tercatat 99 desa hijau, 119 desa kuning, dan 67 desa merah.⁴

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuat program kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Laboratorium Kemiskinan yang diiniasi oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbi . Kebijakan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara terpadu, tepat program, tepat sasaran, serta tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga miskin.⁵ Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian

⁴ <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/resep-kabupaten-pekalongan-tekan-angka-kemiskinan> di unduh 25 November 2022

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/12/13/pjo5n5368-pekalongan-bentuk-laboratorium-penanganan-kemiskinan> di unduh 25 November 2022

tentang “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) Di Kabupaten Pekalongan Dalam Prespektif Maqashid Syariah”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu observasi dan wawancara. Dalam hal ini informan yang dijadikan dalam penelitian adalah keterwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pekalongan serta mengobservasi keterwakilan warga miskin di desa lokus penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan;

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pekalongan dalam prespektif Maqashid Syariah. Laboratorium Kemiskinan merupakan sebagai kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan yang mana dalam implementasinya perangkat daerah sebagai unit pelaksana berusaha dengan maksimal dalam mendukung kebijakan pemerintah. Jika perangkat daerah selaku unit pelaksana melaksanakan peranannya dengan maksimal maka nantinya tujuan atau target dari Laboratorium Kemiskinan akan tercapai.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam bukunya Budi Winarno implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diciptakan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Berdasarkan Informasi yang peneliti peroleh dilapangan melalui wawancara dengan Keterwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan) bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) yang terlaksana di Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada kenyataannya melalui Kolaborasi Pentahelix yang mana koordinasi menjadi faktor terpenting bagi keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan. Koordinasi lintas sektoral yang di lakukan antar instansi untuk saling bekerjasama melalui

⁶ Budi Winarno, *“Kebijakan Publik: Teori dan Proses”* Yogyakarta:Media Pressindo 2008 Hlm.146-147

kegiatan Participatory Poverty Assessment (PPA) serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam Laboratorium Kemiskinan.

Kegiatan Participatory Poverty Assessment (PPA) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan melibatkan warga miskin sebagai subyek untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan agar persoalan dalam penanggulangan kemiskinan dapat teratasi secara terpadu, tepat program dan tepat sasaran. Dengan kegiatan yang demikian secara riil telah menumbuhkan kepedulian terhadap warga miskin melalui pemberian bantuan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan di setiap desa pilot. Laboratorium Kemiskinan pada tahap awal mengambil 3 desa pilot di tahun 2019 yang telah di Intervensi diantaranya, yaitu Desa Botosari (Pegunungan), Desa Kertijayan (Perkotaan), dan Desa Mulyorejo (Pesisir). Selanjutnya pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) melakukan replikasi pada 6 desa pilot diantaranya : Desa Gembong (Pegunungan), Desa Windurojo (Pegunungan), Desa Pedawang (Pegunungan), Desa Kedungwuni Timur (Perkotaan), Desa Kertijayan (Perkotaan), dan Desa Jeruksari (Pesisir).

Menurut penulis dari pengamatan dilapangan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) di Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan sangat baik terbukti mampu melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan program kegiatan. Selain itu terbukti pula dari program kegiatan yang terlaksana pada tahun 2019 mampu menurunkan angka kemiskinan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dan program kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 mampu menurunkan angka kemiskinan hal ini dapat terlihat dari presentasi kemiskinan di tahun 2022 cukup baik dibandingkan 2 tahun. Namun dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah terlaksana diharapkan Pemerintah Desa tetap melakukan pendampingan kepada warga miskin yang telah diberikan bantuan berupa program kegiatan baik yang sifatnya peningkatan pendapatan maupun penurunan beban, sehingga apa yang telah di upayakan pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penanggulangan kemiskinan dapat menuntaskan persoalan kemiskinan.

Dalam penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan kajian maqashid syariah Umar Chapra sebagai ikhtiar untuk memastikan kesejahteraan semua orang. Kesejahteraan optimal saat ini dan yang akan datang akan terwujud dengan mengoptimalkan nilai-nilai

maqashid syari'ah.⁷ Penerapan nilai-nilai maqashid syariah sangat diperlukan untuk melahirkan model pemberdayaan masyarakat yang tepat dan sesuai permasalahan yang saat ini berkembang di masyarakat. Implementasi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat perlunya nilai-nilai maqashid syariah sehingga nantinya program penanggulangan kemiskinan dapat efektif dan tepat sasaran.⁸ Berikut ini nilai-nilai maqashid Syari'ah dalam penanggulangam kemiskinan :

1. Menjaga Agama (Hifz al-din)

Menurut Umar Capra Agama merupakan petunjuk dalam kehidupan setiap manusia. Dalam hal ini agama memberikan arah yang benar untuk semua aktivitas yang dilakukan manusia meliputi perilaku, gaya hidup, selera, sikap, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas antar sesama.

Menurut penulis berdasarkan Informasi yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan Keterwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan) bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) di Kabupaten Pekalongan melalui Kolaborasi Pentahelix mampu menumbuhkan nilai-nilai maqashid syariah dalam hal menjaga agama. Hal dapat dilihat bahwa solidaritas antar sesama yang di terapkan melalui Kolaborasi Pentahelix dalam kebijakan tersebut.

2. Menjaga Akal (Hifz al-aql)

Menurut Chapra, akal merupakan anugrah yang diberikan Allah swt dimana setiap umatnya perlu mengembangkan pengetahuannya sebagai sarana untuk meningkatkan kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat. Untuk mencapai maqashid syariah perlunya pengembangan pengetahuan. Menurut penulis dari pengamatan dilapangan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) di Kabupaten Pekalongan melalui program kegiatan KUDU SEKOLAH sebagai upaya menurunkan angka tidak sekolah di Kabupaten sehingga para anak usia sekolah tersebut dapat kembali bersekolah untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan. Dari program kegiatan tersebut mampu menumbuhkan nilai-nilai maqashid syariah dalam hal menjaga akal.

⁷ M Umer Chapra and Islamic Development Bank, 'Jurnal : Vision of Development in the Light of Maqāsīd Al-Sharī ' Ah', 2008. hlm27-30

⁸Siti Khayisatuzahro NurLiti Khayisatuzahro NurL hlm.112

3. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Menurut Chapra dalam menjaga keturunan melalui generasi yang baik dan kuat sebagai upaya untuk membangun peradaban. Generasi yang baik dan kuat perlu ditanamkan kepada anak-anak masa kini melalui integritas keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan integritas sebagai ikhtiar untuk menjaga kesehatan keluarganya dalam kesehariannya.

Menurut penulis berdasarkan Informasi yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan Keterwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan) bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) di Kabupaten Pekalongan melalui program Cegah Stunting dan kepedulian dengan anak yang Disabilitas serta Kecacatan. Program tersebut mampu menumbuhkan nilai-nilai maqashid syariah dalam hal menjaga keturunan

4. Menjaga Jiwa (Hifz an-nafs)

Prinsip memelihara jiwa (Hifz an-nafs) Para ulama dan ahli hukum tradisional telah memberikan contoh yang baik dan penting diantaranya : menciptakan atau memenuhi kebutuhan pokok (sembako), menikmati makanan, minuman yang tidak membahayakan kesehatan.

Menurut penulis berdasarkan Informasi yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan Keterwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan) bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) di Kabupaten Pekalongan melalui program bantuan sosial untuk warga miskin. Program tersebut mampu menumbuhkan nilai-nilai maqashid syariah yang di terapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal menjaga jiwa.

5. Pemeliharaan Harta (Hifz al-mal)

Prinsip memelihara harta (Hifz al-mal) memerintahkan kita untuk bertransaksi yang halal dalam berwirausaha sebagai upaya untuk memperoleh kekayaan atau harta serta menjauhi larangan-larangannya. Perkembangan ekonomi saat ini diantaranya : kesejahteraan masyarakat, program bantuan sosial, lembaga zakat, dan koperasi syariah

dalam mengimplementasikannya sebagai upaya pengembangan prinsip memelihara harta (Hifz al-mal) dalam ikhtiar penanggulangan kemiskinan.⁹

Menurut penulis dari pengamatan dilapangan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) di Kabupaten Pekalongan salah satunya melalui program peningkatan pendapatan di Desa Botosari pelatihan pengolahan produk Gula Semut. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Botosari dengan produk Gula Semut tersebut dapat terjual dengan harga yang lebih baik dibandingkan sebelum adanya pelatihan tersebut. Dengan demikian mampu menumbuhkan nilai-nilai maqashid syariah yang di terapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal pemeliharaan harta.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Laboratorium Kemiskinan) di Pekalongan melalui Kolaborasi Pentahelix. Kegiatan Participatory Poverty Assessment (PPA) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengambil keputusan program kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan agar mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, tepat program dan tepat sasaran. Nilai-nilai maqashid syariah dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan diantaranya Kolaborasi Pentahelix (menjaga agama), KUDU SEKOLAH (menjaga akal), Cegah Stunting dan kepedulian dengan anak yang Disabilitas serta Kecacatan (menjaga keturunan), program bantuan sosial untuk warga miskin (menjaga jiwa), dan program peningkatan pendapatan salah satunya di Desa Botosari pelatihan pengolahan produk Gula Semut (menjaga harta).

Saran

Bagi peneliti selanjutnya dapat dikembangkan dalam prespektif maqashid secara kontemporer.

⁹ Prof. Dr. H. DUSKI IBRAHIM, *AL-Qawa'id AL-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 2019..hlm.150

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Mulianta Ginting, Rasbin, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis', 2.1 (2010)
- Chapra, M Umer, and Islamic Development Bank, 'Jurnal : Vision of Development in the Light of Maqāsīd Al-Sharī ' Ah', 2008
- Dr.J. Raco, M.E. M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakter Dan Keunggulannya)*, 2010
- Dr.Tjipto Subadi, M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006
- Embong, Mohd Rodzi, Roshaliza Taha, Mohd Nazli, and Mohd Nor, 'Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia', 39.2013 (2014)
- Ghulam, Zainil, 'Implementasi Maqashid Syariah', 7.1 (2016)
- Ispriyanti, Dwi, Alan Prahutama, and Dan Mustafid, 'Jurnal : Analisis Klasifikasi Kemiskinan Di Kota Semarang Menggunakan Algoritma Quest', 7.1 (2019)
- Jajang, A, W Mahri, | Cupian, M Nur, Rianto Al Arif, Tika Arundina, and others, *Ekonomi Pembangunan Islam*” Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, ed. by Muhammad Irfan, Sultan Emi (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021)
- Ari Mulianta Ginting, Rasbin, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis', 2.1 (2010)
- Chapra, M Umer, and Islamic Development Bank, 'Jurnal : Vision of Development in the Light of Maqāsīd Al-Sharī ' Ah', 2008
- Dr.J. Raco, M.E. M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakter Dan Keunggulannya)*, 2010
- Dr.Tjipto Subadi, M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006
- Embong, Mohd Rodzi, Roshaliza Taha, Mohd Nazli, and Mohd Nor, 'Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia', 39.2013 (2014)
- Ghulam, Zainil, 'Implementasi Maqashid Syariah', 7.1 (2016)
- Ispriyanti, Dwi, Alan Prahutama, and Dan Mustafid, 'Jurnal : Analisis Klasifikasi Kemiskinan Di Kota Semarang Menggunakan Algoritma Quest', 7.1 (2019)
- Jajang, A, W Mahri, | Cupian, M Nur, Rianto Al Arif, Tika Arundina, and others, *Ekonomi Pembangunan Islam*” Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, ed. by Muhammad Irfan, Sultan Emi (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021)

Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, *AL-Qawa'id AL-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 2019 Saragih, Juli Panglima, 'Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa YOGYAKARTA (Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta)', 6.1 (2015)

Saryana, 'Disertasi : Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia', 2020

Siregar, Zulkifli, 'Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan', 1.2 (2019)

Siti Khayisatuzahro Nur¹, Dimas Herliandis Shodiqin², 'Jurnal : Peran Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah Pandemi Covid 19', 1.1 (2022)

Ustama, Dicky Djatnika, 'Jurnal : Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan', 6.1 (2006)

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/resep-kabupaten-pekalongan-tekan-angka-kemiskinan> di unduh 25 November 2022

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/12/13/pjo5n5368-pekalongan-bentuk-laboratorium-penanganan-kemiskinan> di unduh 25 November 2022

<https://www.bps.go.id/> di unduh 20 November 2022

<https://pekalongankab.bps.go.id/> di unduh 20 November 2022